

Kasus Gizi Buruk di Cianjur Masih Banyak

CIANJUR (IM)- Kasus anak yang mengalami gizi buruk di Kabupaten Cianjur masih cukup banyak. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cianjur mencatat selama rentang waktu 2019 hingga 2021, ada 289 orang balita yang mengalami gizi buruk.

“Total selama tiga tahun terakhir, ada 289 balita yang mengalami gizi buruk,” ujar Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cianjur, Irvan Nur Fauzy kepada wartawan, Kamis (27/5).

Rinciannya, pada 2019 ada sebanyak 93 balita dengan gizi buruk. Selanjutnya, pada 2020 naik mencapai 153 balita gizi buruk. Berikutnya selama periode Januari hingga Mei 2021, tercatat 43 balita gizi buruk dan salah satunya, Muhammad Bayu, balita asal Agrabinta yang kini kondisinya membaik.

Irvan mengatakan, kenaikan kasus gizi buruk terjadi saat awal pandemi Covid-19. Meskipun demikian, belum bisa dipastikan dampak dari pandemi pada peningkatan kasus gizi buruk di Cianjur.

Lebih lanjut Irvan mengatakan, berdasarkan data memang paling banyak kasus pada masa awal pandemi. Hal ini karena pada saat awal pandemi, layanan menjadi kurang maksimal, misalnya ada pembatasan dan khawatir terjadi penyebaran Covid.

Kondisi inilah, Irvan menambahkan, yang mungkin jadi salah satu faktor kenaikan pada tahun lalu. Dia mengatakan, faktor utama masih banyaknya kasus gizi buruk di Cianjur, di antaranya minimnya pengetahuan orang tua dalam pemenuhan gizi untuk anak.

Kondisi ini, tutur Irvan, terutama terjadi di wilayah Cianjur selatan. Di mana orang tua kurang dalam memperhatikan asupan gizi anak. Di samping itu, adanya penyakit penyerta membuat anak rentan mengalami gizi buruk.

Dari data yang ada, ungkap Irvan, rata-rata balita gizi buruk di Cianjur mengidap TBC dan hepatitis. Dengan demikian, penyakit tersebut membuat asupan gizi di dalam tubuh anak berfokus pada penyakit yang menjangkitnya.

Dalam artian, Irvan menambahkan, asupan gizi ke tubuh fokus ke penyakit yang dideritanya sehingga dampak ini terjadi pada balita di Agrabinta yang beberapa hari lalu.

Ke depan, Irvan menargetkan, Dinkes telah menginstruksikan petugas di tingkat puskesmas dan posyandu untuk memantau kondisi setiap balita di Cianjur. Misalnya, dengan mengintensifkan lagi program posyandu untuk mendeteksi sejak awal anak yang mengalami gizi buruk agar bisa ditangani dengan cepat. ● pur

Pemilik Tempat Usaha di Kab. Bogor Wajib Memiliki Apar

CIBINONG (IM)- Kepala Bidang (Kabid) Penanggulangan Kebakaran, Damkar Kabupaten Bogor, Jaja Sujatma, angkat suara perihal terjadinya kebakaran ruko toko seputar di Jalan Raya Sukahati, Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis (27/5).

Jaja mengatakan bahwa peristiwa kebakaran yang terjadi sekitar pukul 07.30 WIB itu diduga akibat korsleting arus listrik. “Kebakaran diduga akibat arus listrik karena itu terjadi di lantai atas, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, Jaja menyoroti beberapa hal usai kebakaran yang terjadi di area pertokoan yang masuk dalam katagori padat.

Jaja mengimbau agar pemilik tempat usaha untuk dapat memenuhi sejumlah

aspek keamanan dan kenyamanan, salah satu aspek yang wajib dimiliki itu yakni Apar (Alat Pemadam Api Ringan).

“Saya imbau kepada masyarakat, setiap memiliki usaha apapun, demi kenyamanan dan keamanan, maka setiap tempat usahanya disediakan Apar,” tegasnya.

“Karena setelah dilakukan pengecekan beberapa ruko, di sini tidak memiliki Apar, jadi kalau ada api kecil saja maka tindakan awal tidak ada,” tambahnya.

Dalam peristiwa kebakaran di ruko Jalan Raya Sukahati, no 112, Cibinong, Kabupaten Bogor itu kerugian yang dialami pemilik toko mencapai miliaran rupiah. “Kalau kerugian, kemarin itu pemilik toko baru saja belanja, kalau dihitung hitung mencapai Rp 1 miliar,” tandasnya. ● gio



IDN/ANTARA

GERAKAN NASI BUNGKUS DUA RIBU

Pekerja memasak untuk kebutuhan gerakan nasi bungkus dua ribu di Jalan Natuna, Bandung, Jawa Barat, Kamis (27/5). Gerakan sosial yang diinisiasi pegiat sosial Ismaya Safitri tersebut, menyediakan paket makanan dengan beragam lauk pauk yang dijual dengan harga Rp2.000 dan gratis bagi dhuafa dan fakir miskin sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang terdampak COVID-19.

Harga Kedelai Mahal, Disperindag Jabar: Pemerintah Tidak Diam

BANDUNG (IM)- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat (Disperindag Jabar) meminta agar para produsen tahu dan tempe tidak melakukan aksi mogok produksi, lantaran tingginya harga kedelai.

Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Jabar, Eem Sujatma mengatakan operasi pasar telah dilakukan sejak Januari 2021 bersama dengan pihak terkait lainnya, termasuk Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo). Tetapi operasi pasar tidak bisa memenuhi kebutuhan produsen yang tinggi, sedangkan pasokan terus berkurang.

Eem mengatakan tingginya permintaan kedelai ini juga tidak bisa diimbangi oleh besaran pasokan dari importir. “Berdasarkan keterangan Kementerian Perdagangan importir lagi susah, Amerika sebagai importir lagi banyak permintaan. Kedelai di kita ada, tidak langka namun harganya mencapai Rp 10.500-Rp10.700 per kilogram,” kata Eem di Bandung, Kamis (27/5).

Menurut dia, masalah kedelai ini tak hanya terjadi di Jabar, tetapi di seluruh daerah di Indonesia. Tingginya permintaan tak bisa diimbangi dengan pengimpor. “Saat ini masih menunggu arahan

dan kebijakan teknis dari Kementerian Perdagangan dan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian terkait solusi agar urusan kedelai ini tidak terjadi kelangkaan,” ujar Eem.

Pihaknya memastikan bahwa dari informasi yang didapat dari Gakoptindo, tidak ada perintah agar produsen tempe dan tahu melakukan mogok produksi. “Mungkin ada yang mogok, tapi tidak semuanya. Pemerintah tidak tinggal diam kok,” ucapnya.

Salah satu solusi dari Gakoptindo pada para produsen, menurut Eem, adalah produsen tidak mogok produksi dan disarankan untuk menaikkan harga jual maksimal 30 persen. “Kalau tahu tempe naik 30 persen, itu tidak akan jadi masalah, secara organisasi Gakoptindo tidak menyarankan libur produksi, kalau dia mogok implikasinya malah akan lebih banyak,” tuturnya.

Disperindag Jabar memilih agar produsen menaikkan harga produksi sebagai solusi jangka pendek yang bisa ditempuh oleh para produsen ketimbang mogok produksi. “Sambil kita menunggu kebijakan lebih lanjut dari Kementerian Perdagangan,” ucap Eem. ● pur

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

GERAKAN CINTA MAKANAN TRADISIONAL

Bupati Bogor Ade Yasin (tengah) membuat makanan tradisional saat acara Gerakan Cinta Makanan Tradisional bahan pangan lokal di Ecopark Lipi, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/5). Pemkab Bogor mengajak masyarakat untuk mencintai kuliner asal wilayahnya sendiri sebagai upaya pemulihan ekonomi imbas pandemi COVID-19 serta menjaga eksistensi dan identitas budaya lokal.

Bupati Bogor Ajak Milenial Cintai Makanan Tradisional

Salah satu strategi untuk mengajak generasi muda untuk mencintai kuliner tradisional yaitu dengan menghadirkan kuliner tradisional dengan inovasi dan olahan modern untuk mendukung komunitas pangan lokal dalam rangka pemulihan ekonomi daerah.

CIBINONG (IM)-

Bupati Bogor ajak Milenial Cintai Makanan Tradisional. Hal ini diungkapkannya saat membuka kegiatan dalam rangka HUT Kabupaten Bogor ke 536 dengan menggelar “Gerakan Aku Cinta Makanan Tradisional Bahan Pangan Lokal”, di Kebun Raya Cibinong, Kamis (27/5).

Diprakasai oleh Badan Pro-

mosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kabupaten Bogor bersama Apical menjadi salah satu eksportir minyak kepala sawit.

Apical Group, yang merupakan bagian dari group RGE Group turut mendukung Pemerintah Daerah dalam mempromosikan kuliner

tradisional yang diwujudkan melalui penciptaan resep kuliner sehat dan inovatif berbasis kelapa sawit berkelanjutan dengan memanfaatkan bahan pangan lokal seperti ubi, bengkuang, dan talas.

Hal ini sesuai dengan arahan dari Bupati Bogor, Ade Yasin, bahwa salah satu strategi untuk mengajak generasi muda untuk mencintai kuliner tradisional yaitu dengan menghadirkan kuliner tradisional dengan inovasi dan olahan modern untuk mendukung komunitas pangan lokal dalam rangka pemulihan ekonomi daerah.

“Menjaga eksistensi kuliner tradisional serta menempatkannya sejajar atau bahkan lebih tinggi dari kuliner asing akan memberi dampak positif bagi masyarakat. Pengenalan

makanan tradisional kepada generasi muda juga penting untuk memperkuat identitas budaya lokal,” tambah Ade Yasin.

Fajar Marhaendra, Senior Manager IDEAS Apical mengatakan bahwa Apical telah menyiapkan enam resep kuliner tradisional khas Kabupaten Bogor.

“Kami telah menciptakan enam resep berbahan dasar pangan lokal Bogor yang telah kami olah sehingga lebih modern dengan memberi nilai tambahan namun dengan cita rasa khas Bogor yang tidak hilang,” ujar Fajar Marhaendra.

Disebutkan, resep-resep tersebut dinamakan chiffon ubi, pia kelewang, puff pastry bengkuang, puff pastry soto mie Bogor, roti ombak ubi, dan mendut Cibinong yang

juga kami tampilan secara langsung dalam demo masak,” jelas Fajar.

Sementara itu, Ketua Panitia pelaksana Gerakan Makanan Tradisional Bahan Pangan Lokal, Hj Herlina mengatakan kegiatan ini merupakan salah bentuk meniasasi kebangkitan ekonomi di bidang panganan muatan lokal di tengah pandemi Covid-19 belum berakhir.

Lebih jauh disebutkan, dengan menggelar kegiatan sekaligus pencaangan panganan ciri khas Kabupaten Bogor semoga diterima semua kalangan lebih generasi muda.

“Terimakasih kami sampaikan kepada Ibu Bupati dan Apical yang langsung dipimpin oleh bapak Fajar Marhaendra sehingga bisa mewujudkan kegiatan ini,” kata Herlina. ● gio

Empat Perusahaan Incar Pembangunan Lanjutan Masjid Agung

BOGOR (IM)- Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor kembali menyicil penyelesaian pembangunan Masjid Agung Bogor yang terletak di Jalan Dewi Sartika, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor pada tahun ini. Menilik laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bogor, proyek ini sudah mulai ditender awal Mei 2021.

Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) pada Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor, Henny Nurliani mengatakan, tercatat ada empat perusahaan yang bersaing memperebutkan proyek dan sudah melakukan penawaran.

“Sudah ada empat perusahaan yang menyampaikan penawaran harga serta sudah menyampaikan jaminan penawaran. Pembukaan penawarannya sejak 21 Mei lalu,” kata Henny, Kamis (27/5).

Lebih lanjut, Henny mengatakan, tahapan tender sudah memasuki masa evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga penawaran. Selain itu, dijadwalkan sudah ada pemenang pada 31 Mei mendatang.

“Kini sedang tahap evaluasi. Mudah-mudahan lancar dan ada yang lulus (evaluasi).”

Sehingga bisa ditetapkan pemenang sesuai jadwal dan segera terealisasi,” ujarnya.

Berdasarkan data di laman LPSE Kota Bogor, empat perusahaan yang merebutkan proyek pembangunan lanjutan Masjid Agung Bogor yakni PT Hana Huberta, PT Mandiri Tri Bintang, PT Gelora Megah Sejahtera dan PT Debitindo Jaya. Penawaran tersebut dimulai dari kisaran harga Rp 30,2 miliar hingga Rp 31,5 miliar.

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan, lelang yang sedang dilakukan untuk pembangunan Masjid Agung tersebut berupa lelang pelaksanaan dan pengawas. Ditargetkan, awal Juli 2021 pembangunan sudah bisa dimulai.

Dedie menuturkan, pembangunan lanjutan Masjid Agung Bogor pada 2021 ini menggunakan dana sebesar Rp 32 miliar. Dimana dana tersebut difokuskan untuk pembangunan konstruksi atap.

“Insya Allah tahun ini ada anggaran sekitar Rp 32 miliar yang akan kita fokuskan untuk pembangunan konstruksi atap. Diperkirakan awal Juli sudah bisa dimulai,” ujar Dedie.

Pada masa sebelum dia dilantik menjadi Wakil Wali Kota Bogor, Dedie mempertanyakan kendala yang dialami Pemkot Bogor dalam melanjutkan pembangunan Masjid Agung Bogor. Diketahui, saat itu terdapat perubahan konstruksi yang mengakibatkan perubahan desain dan teknis yang akhirnya tidak bisa dilanjutkan.

Oleh karena itu, kata Dedie, Pemkot Bogor meminta solusi ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terhadap konstruksi pembangunan Masjid Agung Bogor. Sehingga kemudian mendapatkan prioritas penanganan konstruksi.

Setelah itu, sambung dia, ditunjuk komite keselamatan konstruksi untuk melakukan penghitungan ulang. Dalam waktu enam hingga delapan bulan, keluar rekomendasi yang menunjukkan atap masjid tidak boleh menumpu badan konstruksi lama.

“Jadi ini yang harus kita perhatikan. Karena kalau menumpu pada konstruksi lama, tentu ada kekhawatiran apabila terjadi gempa bumi, kemudian tidak kuat nanti malah terjadi bencana. Padahal konstruksi masjid itu kekuatannya harus 1,5 sampai 2 kalau lipat. Itu yang kemudian harus dihitung ulang,” jelasnya. ● gio



IDN/ANTARA

VAKSINASI DRIVE THRU DI BANDUNG

Petugas kesehatan menyuntikkan vaksin COVID-19 kepada mitra Gojek pada layanan Vaksinasi Drive Thru Gojek dan Halodoc di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Bandung, Jawa Barat, Kamis (27/5). Pemerintah Jawa Barat menargetkan sedikitnya 5000 lansia dan 5000 mitra Gojek terfasilitasi dalam vaksinasi yang berlangsung selama 30 hari ke depan sehingga mempercepat target terbentuknya herd immunity bagi warga Jawa Barat.

DPDR Harap Fasilitas Pemprov Jabar Terapkan Konsep BLUD

BANDUNG (IM)- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPDR) Provinsi Jawa Barat (Jabar) berharap seluruh fasilitas Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerapkan konsep badan layanan umum daerah (BLUD) agar fasilitas tersebut bisa dikelola lebih profesional dan berkembang.

“Konsep BLUD ini dapat mendorong pengelolaan fasilitas milik Pemprov Jabar seperti Taman Hutan Raya Tahura Ir H Djuanda Bandung secara profesional dan berkembang lebih baik,” kata Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Yunandar Eka Perwira, Kamis.

Selain itu, pihaknya juga berharap ke depan setiap unit pelaksana teknis daerah (UPTD) dan balai mempunyai upaya peningkatan serta program-program yang disertai dengan anggaran yang memadai untuk memprioritaskan pembangunan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan.

“Ada aspek-aspek yang bisa dibiayai secara mandiri, sumber

pendanaan jadi lebih baik dan juga berkembang karena dikelola secara profesional,” kata dia.

Ia mencontohkan Tahura Ir Djuanda Dago Bandung misalnya perlu perbaikan fasilitas jalan, peningkatan museum, fasilitas parkir, dan sebagainya.

“Ini (perbaikan) memang masih harus dibiayai bahkan juga ke depannya perlu dibangun juga jalur khusus untuk kawasan yang memang bisa membuat wisatawan berkeliling jauh lebih luas lagi,” kata Yunandar.

Yunandar mengungkapkan terdapatnya anggaran sebesar Rp 9 miliar yang berasal dari APBD provinsi dinilai cukup positif di tengah proses Tahura Ir H Djuanda Bandung menjadi BLUD. “Upaya ini untuk mengefektifkan anggaran dan program-program yang ada untuk tahun 2022. Seperti tahun 2021 anggaran tahura sekitar Rp 9 miliar dari APBD provinsi ini merupakan hal yang cukup positif,” kata Yunandar. ● pur

Pemkot Bogor Selesaikan Aplikasi Digital Aset Tahun 2021

BOGOR (IM)- Pemerintah Kota Bogor telah menyelesaikan aplikasi pendataan dan pencatatan aset milik Pemerintah Kota Bogor secara digital pada 2021, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja sekaligus menaikkan peringkat pada penilaian monitoring center for prevention (MCP).

Sekretaris Daerah Kota Bogor, Syarifah Sofiah mengatakan, aplikasi pencatatan aset secara digital yang dikelola oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) ini baru selesai pada tahun 2021.

“Setelah aplikasi pencatatan aset digital ini selesai, sudah ada penambahan pencatatan sebanyak 41 bidang aset Kota Bogor,” kata Syarifah, kemarin.

Sofiah menjelaskan, pendataan dan sertifikasi aset Kota Bogor menjadi salah satu dari delapan komponen penilaian MCP yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Satgas Bidang Pencegahan pada Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, mendampingi Balai Kota Bogor, pada Kamis (20/5) lalu, untuk menyampaikan hasil pencapaian MCP Kota Bogor tahun 2020.

Dua dari delapan sektor yang menjadi sorotan KPK karena kinerjanya dinilai rendah adalah, area manajemen aset

daerah dengan skor 56,95 persen, serta area optimalisasi pajak daerah adalah 50,57 persen.

Menurut Syarifah, KPK melakukan penilaian skor MCP tersebut pada awal tahun 2020, dimana BKAD Kota Bogor belum memiliki aplikasi pencatatan aset secara digital, sehingga masih banyak aset yang belum tercatat.

“Kini setelah aplikasi digitalnya selesai, Insya Allah kinerjanya menjadi lebih baik,” kata Sarifah, dimana Kota Bogor menargetkan bisa berada pada tiga besar.

Pada kesempatan tersebut, Syarifah menuturkan, sepuluh aset yang masih bermasalah di Kota Bogor, termasuk prasarana dan sarana umum (PSU). “KPK berniat untuk membantu. Pemkot Bogor akan mengundang pada pengusuhannya dalam suatu pertemuan, dan nanti KPK turut turut menjelaskan,” katanya.

Kepala Bidang Aset BKAD Kota Bogor, Dheri Wiridi Rama, mengatakan, BKAD sudah membuat dan mengembangkan aplikasi digitalisasi aset sejak tahun 2020, tapi sempat tertunda karena pandemi Covid-19. “Saat ini aplikasi aset digital itu masih terus dikembangkan dan disempurnakan,” katanya. ● gio